

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Berdasarkan sejarah perkembangannya, studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yakni di mana hubungan internasional menjadi salah satu studi yang terbangun dari berbagai ilmu sosial lainnya. Pembentukan hubungan internasional itu membentuk sifat keilmuan yang timbal balik antara ilmu hubungan internasional dengan ilmu sosial lainnya. Berdasarkan sejarah perkembangannya, hubungan internasional ini umumnya dilahirkan dengan harapan dapat mencegah peperangan dan membangun perdamaian dunia. Oleh karena itu, ilmu ini didorong dengan berbagai usaha untuk dapat menjadi ilmu yang benar-benar mandiri (Darmayadi et al., 2015).

Hubungan Internasional berjalan secara dinamis, dimana ilmu ini berkembang menyesuaikan kondisi sosial manusia. Seiring berjalan waktu adanya berbagai perkembangan dan perubahan pada lingkungan sosial masyarakat juga mempengaruhi ilmu ini. Di awal masa perkembangannya, sejumlah para ahli memberikan pandangannya bahwa ilmu Hubungan Internasional ini mencakup

semua hubungan antar negara. Konsep ini juga cukup sering diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan individu ataupun kelompok dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, Hubungan internasional bukan hanya tindakan fisik melainkan juga kegiatan lainnya baik ekonomi, militer, ataupun diplomasi.

Dengan perkembangan studi hubungan internasional yang semakin pesat, baik dalam cakupan substansi, teori/metodologi, ataupun epistemology, menyebabkan hubungan internasional diterima oleh semua komunitas keilmuan akademik sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial. Studi ini pun menjadi penanda dari aktivitas atau kegiatan lintas negara yang beragam seperti perang, bantuan kemanusiaan, perdagangan, investasi, pariwisata ataupun olimpiade (Lopez dan Stohl, 1989:3). Sehingga dapat dikatakan bahwa studi ini memiliki kaitan kuat dengan segala jenis relasi atau hubungan yang ada di tengah masyarakat internasional baik warga negara ataupun pemerintahnya.

Selain itu, konsep ini juga memegang pengertian sebagai interaksi antara aktor negara yang melewati batas-batas kedaulatan negara. Aktor disini tidak hanya diperankan oleh negara saja, melainkan juga aktor non-negara. Selain aktor yang melakukannya bermacam-macam kalangan, pada hubungan internasional, banyak bidang-bidang lain yang dikaji atau dipelajari baik ekonomi, hukum, organisasi, politik, diplomasi, ataupun bidang lainnya yang

terjadi dalam skala internasional (Ambarwati & Wijatmadja, 2016).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah konsep yang paling penting bagi suatu negara. Hal ini menjadi penting karena kepentingan nasional sebagai tujuan negara akan menjadi dasar dari berbagai kebijakan dan keputusan yang dibuat pemerintah termasuk penentuan dalam politik luar negeri (Putera, 2017). Konsep ini juga menjadi sebuah kebutuhan serta keinginan yang dimiliki suatu negara yang sudah berdiri kedaulatannya dalam menjadi relasi dengan negara berdaulat lainnya yang sudah termasuk dalam lingkungan luar negaranya (Plano & Olton, 1999).

Dalam bahasa Prancis, kepentingan nasional dikenal sebagai *raison d'Etat*, yang berarti tujuan serta ambisi suatu negara, baik dari bidang ekonomi, militer, maupun budaya. Dalam studi hubungan internasional, kepentingan nasional menjadi sangat penting terutama perannya yang mendasari berbagai tindakan atau perilaku negara dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain.

Menurut Machiaveli, sebuah negara menggunakan kepentingan nasional sebagai referensi dalam melakukan praktek ataupun pengembangan teori. Hal ini menjadi justifikasi atau pembenaran dari sebuah negara dalam berperilaku internasional. Walaupun begitu, negara dapat membuang atau tidak mementingkan

kepentingan utama pada jaman dahulu seperti agama dan moralitas sehingga kepentingan nasional sering dikaitkan dengan kekuatan suatu negara yang bersifat destruktif (*hard power*).

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan titik minimal kapasitas sebuah negara dalam melindungi identitas negara dari ancaman atau godaan negara lain. Dari pemikiran ini, pemerintah menyusun dan membangun kebijakan yang spesifik untuk negara lain baik itu bersifat kerjasama atau konflik agar dapat mempertahankan identitas tersebut.

Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini, kepentingan nasional yang relative tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan dan kesejahteraan, serta merupakan dasar dalam menentukan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy, 2002 : 116). Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan mendasar serta faktor penentu akhir yang memfokuskan para pengambil keputusan dari suatu negara dalam membuat atau merumuskan kebijakan luar negeri mereka.

2.1.3 Diplomasi

Diplomasi merupakan suatu bagian penting dalam aktivitas bernegara serta menjadi media utama untuk mengatasi permasalahan

internasional agar dapat tercapainya perdamaian dunia. diplomasi merupakan implementasi pelaksanaan hubungan antar negara yang dilakukan oleh perwakilan resmi dengan tujuan untuk mempertahankan kebijakan negeri suatu negara dalam mempengaruhi kebijakan serta sikap dari pemerintah negara lainnya (Darmayadi et al., 2015).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diplomasi merupakan suatu urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara suatu negara dengan negara lainnya atau juga diartikan sebagai urusan kepentingan suatu negara dengan perantara wakil-wakilnya di negara lain (<https://kbbi.web.id/diplomasi> diakses pada 30 May 2022).

Diplomasi merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Dengan adanya diplomasi, suatu negara dapat membangun image mereka. Dalam hubungan internasional, umumnya diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal dari suatu negara yang akan menjalin hubungan bilateral dengan negara lainnya sehingga kedua negara tersebut dapat mengembangkan hubungan mereka untuk kedepannya.

Menurut Sir Earnest Satow dalam bukunya yang berjudul *Guide to Diplomatic Practice* mengatakan bahwa diplomasi merupakan penerapan kepandaian serta teknik dalam pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dengan negara-negara berdaulat (Rendi Prayuda, 2019).

Dalam pelaksanaan diplomasi, terdapat beberapa fungsi utama,

yakni;

1. Diplomasi berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antar negara
2. Diplomasi memiliki fungsi untuk merundingkan kesepakatan
3. Diplomasi berfungsi sebagai kecerdasan, yang berarti bagaimana upaya untuk mengumpulkan berbagai informasi dari luar negeri untuk negara mereka
4. Diplomasi berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik dalam hubungan internasional
5. Diplomasi berfungsi sebagai media yang melambungkan keberadaan suatu bangsa (Triwahyuni, 2022).

Diplomasi bagi setiap negara secara umum mempunyai tujuan untuk mengamankan kepentingan nasional, kebebasan politik dan juga integritas teritorial. Kautilya menjelaskan bahwa tujuan ini diutamakan dalam menjamin laba maksimal yang didapatkan sebuah negara dan juga mengangkat penjagaan keamanan sebagai kepentingan terdepan yang perlu diutamakan. Oleh karena itu, diplomasi ini memiliki fungsi utama untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan perbedaan atau pun perselisihan antar negara sehingga negara dapat menjaga kepentingan negaranya, karena apabila negosiasi berhasil, negara akan mendapat kepentingannya dan apabila negosiasi gagal, negara dapat terlibat dalam peperangan.

Dalam dunia politik, diplomasi merujuk kepada proses komunikasi

antara aktor-aktor internasional dengan menggunakan upaya negosiasi guna menyelesaikan konflik. Diplomasi juga dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara guna mencapai tujuannya serta memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambil (Darmayadi et al., 2015).

Diplomasi dalam suatu negara dapat diukur efektivitasnya dengan melihat kekuatan nasional negaranya. Dalam berdiplomasi, negara perlu memperhitungkan baik kekuata (*power*) dan sumber daya yang dimiliki. Kedua hal tersebut penting karena keduanya termasuk dalam penilaian kemampuan atau kapabilitas suatu negara terhadap negara lainnya (Rendi Prayuda, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara dapat dinyatakan berhasil dalam melaksanakan praktik berdiplomasi apabila negara mereka mampu menggunakan *power* mereka dengan baik.

Diplomasi memiliki berbagai ragam macam, yakni:

1. Boejuis-Sipil, diplomasi ini mengedepankan solusi negosiasi dan keuntungan bersama (*win-win solution*) dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
2. Demokratis, suara rakyat di negaranya diperhitungkan dan diperhatikan dalam melaksanakan diplomasi sehingga diplomasi ini cenderung bersifat langsung dan terbuka.
3. Totaliter, meningkatkan peran negara menjadi tujuan utama dari diplomasi ini.

4. Preventif, dilakukan dengan mengupayakan pencegahan-pencegahan terutama pada saat masyarakat menghadapi suasana genting yang dapat memunculkan konflik besar atau perang.
5. Provokatif, berbanding terbalik dengan preventif, diplomasi ini direncanakan untuk menyudutkan negara lain agar masyarakat internasional menentang politik negara tersebut.
6. Perjuangan, diplomasi ini memperjuangkan hak-hak negaranya dan mempertahankan posisinya dalam mengalami kondisi bahaya atau darurat terutama dari campur tangan negara lain.
7. Multijalur (*Multitrack Diplomasi*), merupakan diplomasi yang total dilakukan oleh Indonesia dimana pengguna seluruh upaya pada aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri.
8. Publik (*Soft power Diplomacy*), diplomasi ini mengangkat pandangan jalur alternatif dalam menyelesaikan masalah terutama dengan menarik perhatian publik (Maulidina, 2021).

2.1.4 Diplomasi Budaya

Diplomasi budaya mempunyai bermacam-macam pemahaman, beberapa anggapan menganggap diplomasi budaya sebagai bagian dari diplomasi public yang menggunakan budaya sebagai jembatan positif dalam menunjukkan identitas nasional agar dapat menumbuhkan rasa saling peduli. Diplomasi budaya juga dianggap

sebagai satu bentuk dari diplomasi *soft power* serta bagian dari diplomasi publik yang dilaksanakan suatu negara dalam mempromosikan serta melindungi kepentingan nasional mereka. Terdapat sejumlah aspek yang menjadi bagian dalam kegiatan diplomasi budaya termasuk seni, bahasa, dan informasi.

Bagi kaum nasionalis, diplomasi budaya adalah salah satu domain penting untuk memenuhi kepentingan negaranya. Louis Bélanger dikutip dalam Zamorano (2016) menjelaskan bahwa diplomasi budaya adalah “aktivitas kebijakan luar negeri suatu negara yang berkaitan dengan budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, untuk membangun hubungan dengan kegiatan spiritualitas, nilai, ataupun kepercayaan”.

Diplomasi budaya merupakan bagian dari *soft power diplomacy* serta merupakan strategi yang efektif karena budaya adalah salah satu sumber *soft power* yang sangat penting. Diplomasi budaya memiliki pengertian lainnya yaitu usaha negara dalam mempertahankan kepentingan nasional negaranya melalui budaya negara, baik mikro (pendidikan, ilmu pengetahuan, olah raga, kesenian) ataupun makro (propaganda, ciri khas utama, dan lainnya) yang bukan termasuk dalam politik, ekonomi, dan militer (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/pedoman-diplomasi-budaya/> diakses pada 6 Mei 2022).

Diplomasi budaya merupakan upaya pertukaran budaya antara

dua atau lebih kelompok budaya yang direalisasikan guna memperkuat kerjasama antar kelompok serta memenuhi kepentingan nasional. Dalam hal ini, diplomasi budaya dapat dilakukan ke dalam maupun ke luar negeri, perbedaannya sebagai berikut;

1. Diplomasi budaya ke luar negeri: merupakan suatu usaha serta upaya pertukaran budaya antara dua negara atau lebih yang dilakukan untuk memperkuat hubungan kerjasama antar negara serta untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara.
2. Diplomasi budaya ke dalam negeri: merupakan usaha serta upaya pertukaran budaya antara dua atau lebih kawasan budaya di dalam suatu negara yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat hubungan kerjasama antar kawasan atau wilayah serta untuk memenuhi kepentingan nasional yang melingkupi wilayah-wilayah tersebut.

Tujuan utama dari diplomasi ini bukan hanya membangun relasi dan hubungan, melainkan mempengaruhi pendapat publik mengenai negaranya agar dapat membantu dalam melakukan kebijakan politik luar negeri. Pola umum pada diplomasi ini mengarah kepada hubungan antara masyarakat satu negara dengan masyarakat negara lainnya. Budaya menjadi alat yang digunakan sebagai topik yang dibahas dengan menggunakan beragam media mulai dari elektronik

hingga cetak untuk memperkenalkannya. Sehingga, budaya dapat memenuhi misinya dalam menjadi instrument dan sarana diplomasi suatu negara.

Dari penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bagaimana diplomasi budaya merupakan upaya dinamis yang dilakukan suatu negara menggunakan budaya-budaya negaranya agar dapat menjaga persatuan dan mendapatkan pengakuan serta memunculkan rasa hormat dari negara asing dengan adanya pertukaran budaya. Oleh karena itu, demi kepentingan negaranya, masyarakat negara tersebut mempunyai kewajiban dalam melakukan dan ambil bagian dalam diplomasi budaya agar dapat tercapai baik persatuan, kesatuan, kesejahteraan, dan kepentingan negara lainnya.

2.1.5 Soft Power

Dalam Hubungan Internasional, *Power* adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. *Power* merupakan suatu kekuatan yang diperlukan oleh pihak tertentu, khususnya bagi negara agar dapat memenuhi kepentingan nasional mereka. Secara umum, *power* dapat dilakukan melalui tiga cara yakni; ancaman (tindakan koersif), pancingan dan pembayaran serta daya tarik atau pengaruh guna membuat pihak lain melakukan apapun yang diinginkan. Cara ini menyebabkan terbentuknya pengelompokan *power* menjadi dua, yaitu *hard power* (militer, paksaan) dan *soft power* (daya tarik) (Rahmarilla,

2019).

Power terbagi kedalam dua jenis yang berbeda yaitu *hard power* dan *soft power*. *Hard power* merupakan kemampuan suatu pihak dalam memaksa pihak lainnya untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki pihak pertama (Yani et al., 2017).

Joseph S. Nye menciptakan istilah *soft power* guna menjelaskan kemampuan yang dimiliki suatu bangsa dalam menarik serta membujuk. Dalam bukunya yang berjudul “*Soft Power The Means Of To The Success In World Politics*”, Nye menjelaskan bahwa *soft power* menjadi kemampuan yang dimiliki negara dalam mendapatkan tujuan atau keinginan negaranya melalui ketertarikan bukan pemaksaan ataupun pembayaran (*payment*) yang muncul dari daya tarik budaya, cita-cita politik, serta kebijakan suatu negara. Nye juga berpendapat bahwa *soft power* dapat dilakukan oleh semua negara guna meningkatkan pengaruh mereka dalam politik internasional (Nye, 2005).

Menurut Nye, sumber *soft power* terbagi menjadi tiga yakni budaya, nilai politik serta kebijakan luar negeri, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Budaya merupakan seperangkat nilai dan praktik dalam suatu masyarakat yang memiliki banyak manifestasi. Pada dasarnya, budaya dibedakan menjadi budaya tinggi (strata, seni, dan pendidikan) yang menarik bagi kaum elit, serta budaya populer

dimana berfokus pada hiburan massal. Di saat budaya negara juga dimasukkan dengan bebrnapa nilai umum dan disertakan dengan kebijakan yang mempromosikan nilai budaya tersebut beserta dengan kepentingan menarik bagi orang lain, maka dapat menaikkan tingkat kemungkinan negara dalam mendapatkan hasil atau tujuan yang diharapkan dengan melalui hubungan yang sudah diciptakan tersebut (Nye, 2005).

2. Nilai politik seperti ideologi serta sistem politik. Penerapan nilai-nilai politik secara menyeluruh dan dijalankan dengan konsisten oleh suatu negara dapat memberikan image positif dari negara, bahkan dapat menjadikan negara tersebut sebagai teladan bagi negara lain. Namun, nilai politik yang dapat menarik negara lain hanyalah negara-negara yang mempunyai dan memeluk ideology yang mirip atau sama dengan negaranya sehingga diyakini sejalan dengan iklim politik di negaranya (Rosyidin, 2018).
3. Kebijakan luar negeri yang sejalan dengan norma-norma serta menjunjung nilai kemanusiaan akan mendapat apresiasi dari negara lain dan juga memberikan image positif bagi negara tersebut (Rosyidin, 2018).

Soft power mempunyai beberapa batasan dalam mengimplementasikannya, yaitu:

1. Keberadaan imitasi yang dapat membuat berkurangnya efek *soft power*.

2. Ketergantungan *soft power* yang lebih besar sehingga penggunaan *hard power* menjadi tidak seimbang.
3. *Attraction* mempunyai efek yang lebih meluas, sehingga sukar untuk melakukan pengukuran dengan pasti sehingga pengukuran *soft power* tidak dapat dilakukan dengan sempurna.
4. *Soft power* dapat mengalami kehilangan daya tarik atau menjadi kurang penting jika apabila hanya difokuskan pada suatu negara.
5. *Soft power* lebih sering memberikan efek kepada tujuan suatu negara, hanya sebagian yang berdampak pada tujuan khusus.
6. Pemerintah tidak memiliki control yang penuh terhadap daya tarik (Rahmarilla, 2019).

Yanyan M. Yani menjelaskan *soft power* adalah tindakan peningkatan citra negara. Dilakukannya tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan simpati negara asing sehingga dapat memberikan bantuan atau bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan negara sehingga *soft power* ini menjadi caranya. Setelah dilakukannya pendekatan ini dapat membantu posisi negara dalam politik internasional (Yani et al., 2017).

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *soft power* merupakan kemampuan suatu bangsa atau negara dalam memperluas pengaruh mereka serta untuk mencapai kepentingan nasional mereka tanpa melalui cara kekerasan ataupun paksaan, melainkan dengan daya tarik yang mereka punya.

2.1.6 Hubungan Bilateral

Bilateralism atau hubungan bilateral merupakan suatu hubungan yang melibatkan atau yang terdiri dari dua belah pihak. Hubungan bilateral biasanya digunakan dalam menyebut hubungan yang terjalin antara dua negara, baik hubungan dalam bidang politik, budaya, maupun ekonomi. Secara umum, hubungan internasional dilaksanakan menggunakan cara bilateral seperti perjanjian politik, perjanjian ekonomi, dan kunjungan antar negara.

Hubungan bilateral adalah suatu situasi yang memvisualkan relasi timbal balik dari dua negara yang saling berhubungan yang dimana negara menjadi aktor utama dalam terjalannya hubungan ini (Perwita & Yadi, 2005).

Dalam hubungan bilateral, terdapat tiga motif, yakni:

1. Mencapai kepentingan nasional
2. Memelihara perdamaian
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yadi, 2005).

Dalam hubungan bilateral juga ada beberapa perjanjian yang dilakukan. Perjanjian-perjanjian ini disebut sebagai perjanjian bilateral. Perjanjian ini cenderung memiliki sifat khusus yang sering disebut *treaty contract* atau tertutup. Sifatnya dapat dibilang tertutup karena hal-hal yang diatur dalam perjanjian hanya membahas mengenai kepentingan dari kedua pihak negara sehingga menutup kemungkinan bagi negara lain untuk dapat terlibat dalam perjanjian itu (Gemilang, 2015).

Kerjasama ini menjadi hubungan antar dua negara yang mempengaruhi satu sama lain sehingga terbentuklah relasi timbal balik. Relasi tersebut dapat berkembang menjadi kooperasi yang pola kerjasamanya adalah salah satu bagian dari aksi reaksi yang memiliki proses:

1. Rangsangan atau kebijakan actual dari negara yang memprakasai
 2. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima
 3. Respon atau aksi balik dari negara penerima
 4. Presepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa
- (Perwita & Yadi, 2005).

Kerjasama bilateral mempunyai tujuan yang difokuskan sesuai dengan kepentingan kedua negara yang bekerjasama. Umumnya, kerjasama bilateral bertujuan untuk mendorong agar terbentuknya sebuah kerjasama antar negara. Berikut keuntungan yang diperoleh dari kerjasama bilateral;

- Meningkatkan dan mencapai kepentingan negara. Dengan adanya kerjasama bilateral, negara mampu mengenalkan budaya dan produk khas negara ke negara yang berhubungan dalam kerjasama tersebut sehingga negara dapat menjalin hubungan baik terutama dalam perdagangan di pasar yang besar yaitu pasar internasional.
- Memperkuat hubungan antar negara; dengan menjalin hubungan kerjasama, dapat meningkatkan serta memperkuat hubungan persahabatan antar negara. Adanya hubungan kerjasama antar negara ini membuat kedua negara tersebut dapat meningkatkan hubungan

selain hubungan kerjasama tersebut.

- Mempromosikan produk dalam negeri; kerjasama ini akan menjadi media dalam mempromosikan serta memperkenalkan produk lokal suatu negara agar dapat dipahami oleh masyarakat luar. Dengan begitu, produk lokal dapat semakin dikenal secara luas serta dapat meningkatkan daya jual.
- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi; dengan adanya kerjasama bilateral, dapat mempermudah dalam mengakses produk non-domestik untuk dikonsumsi di dalam negeri, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian suatu negara.
- Mempermudah akses pinjaman finansial; kerjasama bilateral pada sektor mata uang dapat mempermudah suatu negara untuk memperoleh pinjaman finansial pada saat dibutuhkan.
- Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan adanya sharing antara dua negara yang bekerjasama, maka suatu negara dapat meniru negara lain pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga semakin modern dan maju (Anindita, 2020).

2.1.7 Budaya dalam HI

Peran kebudayaan di dalam hubungan internasional kerap dianggap hanya sebatas performa kesenian seperti kegiatan lawatan kesenian ataupun pameran kesenian yang dilakukan ke negara-negara asing. Jika ditelaah lebih jauh, peran kebudayaan di dalam hubungan internasional lebih dari hanya sekedar itu, karena sebagian besar masalah dari

hubungan internasional adalah mengenai kebudayaan. Karena untuk memulai suatu hubungan atau kerjasama antar negara, maka kedua negara tersebut hendaknya memahami bagaimana kebudayaan dari negara yang akan diajak untuk bekerjasama agar hubungan persahabatan atau kerjasama kedua negara tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Dalam hubungan internasional, budaya merupakan salah satu kekuatan nasional. Joseph Nye mengatakan bahwa budaya merupakan salah satu sumber *soft power* dimana perannya tak kalah penting dari *hard power*. Budaya dalam konteks ini tidak diartikan hanya sebatas budaya populer (*pop-culture*) sebagaimana umumnya orang-orang sering mengasosiasikannya seperti budaya pop *Hollywood*, music rock, drama Korea, Kartun, Manga, dan lain sebagainya. Semakin universal budaya yang dimiliki oleh suatu negara maka semakin berpengaruh negara tersebut hingga dapat dengan mudah dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Hal ini dikarenakan budaya dapat memikat sehingga mereka yang terpikat akan lebih mudah dipengaruhi – dalam bahasa Nye, dikooptasi (Nye, 2005). Diplomasi budaya merupakan salah satu contoh konkret bagaimana suatu negara menggunakan *soft power* mereka dalam politik luar negeri.

Hubungan antara budaya dengan hubungan internasional dapat terlihat dalam kerangka diplomasi budaya dimana pada kerangka ini digambarkan bagaimana diplomasi sebagai salah satu bagian dalam

studi hubungan internasional tidak hanya berarti perundingan ataupun negosiasi saja, namun juga dapat diartikan sebagai upaya negara dalam mengelola hubungan yang dibangun dengan negara lain baik secara damai ataupun peperangan. Diplomasi ini pun dapat dikelompokkan baik yang bersifat mikro ataupun makro. Pada mikro, diplomasi kebudayaan ini lebih dalam artian sempit yang dimana termasuk dalam kesenian dan sejenisnya. Sedangkan pada makro, diplomasi budaya dinyatakan sebagai bentuk kelola dari relasi antar bangsa yang menggunakan atau melibatkan kebudayaan dalam arti yang lebih luas.

Relasi kebudayaan dan hubungan internasional juga dapat dipahami melalui konsep *Soft Power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye, yaitu:

“Soft power is the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments. It arises from the attractiveness of a country’s culture, political ideals, and policies. When our policies are seen as legitimate in the eyes of others, our soft power is enhanced”

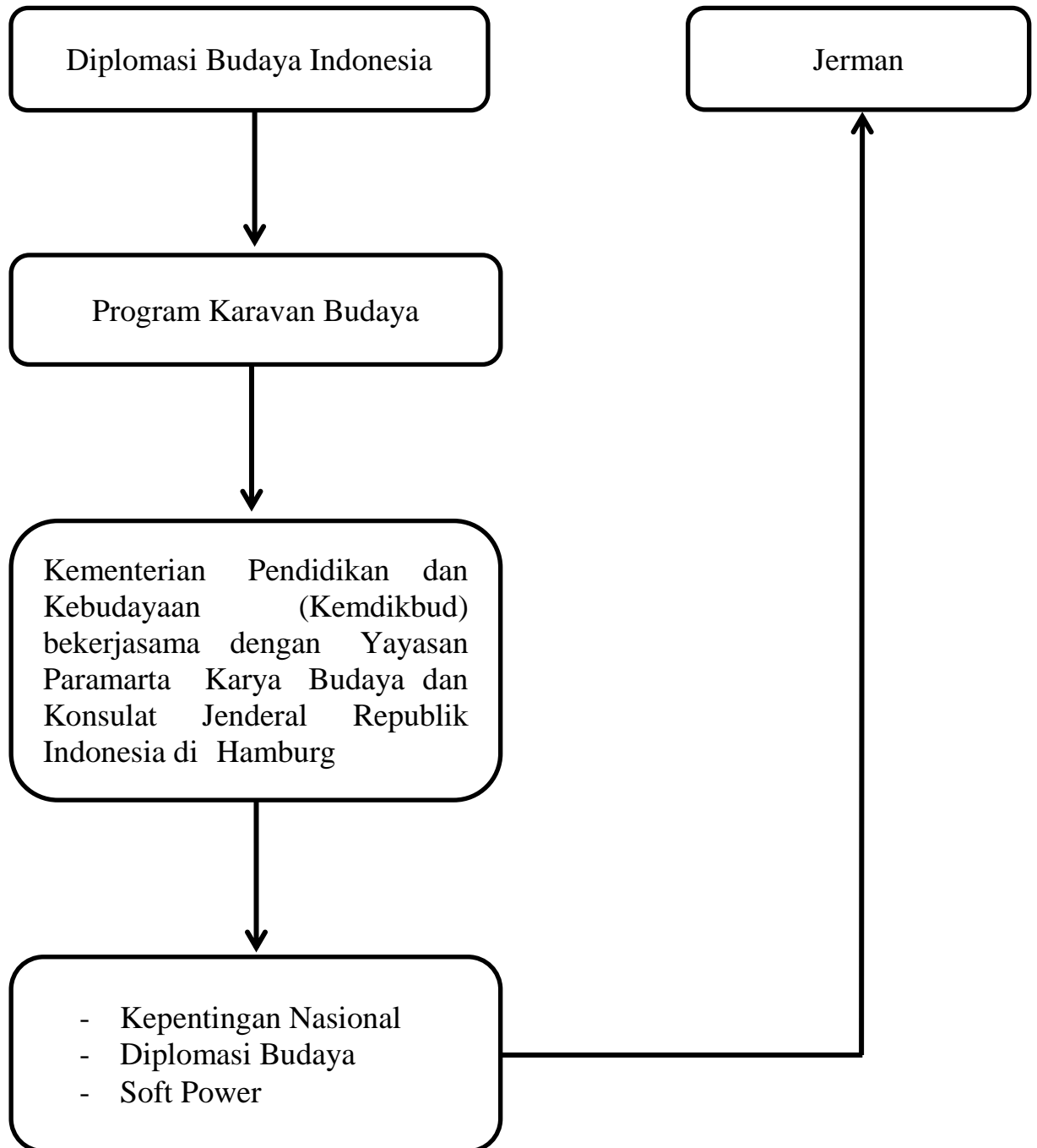
(<https://hi.umy.ac.id/kebudayaan-dalam-hubungan-internasional/>

diakses pada 31 Mei 2022).

Oleh karena itu, unsur dari budaya yang dipunya negara diaturagar dapat dicocokkan dan dipergunakan untuk menjadi sarana atau instrument demi meningkatkan ketertarikan dan perhatian dari negara lainnya dalam menjalin hubungan kerjasama. Sehingga, penggunaan budaya ini pun dapat memenuhi kepentingan yang dimiliki negaranya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional menjadi salah satu studi penting bagi suatu negara agar dapat mempertahankan kedaulatannya dengan menjalin hubungan dengan negara lain. Cara untuk menjalin hubungan itu seringkali disebut diplomasi yang dimana memiliki beragam jenis. Diplomasi budaya merupakan salah satu jenis diplomasi, sebagai salah satu *soft power* diplomasi ini sering digunakan pada masa ini yang dimana dunia cenderung memilih jalur perdamaian. Diplomasi budaya yang termasuk dalam satau satu diplomasi public menjadi salah satu jenis berdiplomasi yang cinta damai karena target utamanya adalah menarik perhatian publik dan membangun citra positif. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia menggunakan Budaya Indonesia untuk berdiplomasi dan mencapai kepentingan nasional. Indonesia perlu meningkatkan eksistensinya di masyarakat internasional dan Budaya menjadi alatnya sedangkan pemerintah menjadi penyalur yang perlu berperan aktif dalam mempromosikannya. Kelompok Masyarakat dari Yayasan Pramarta yang bergerak di bidang budaya bekerja bersama pemerintah untuk membentuk kegiatan bernama Karavan Budaya yang dilakukan di Jerman untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan melakukan praktik dari diplomasi budaya.

Kerangka Pemikiran**Bagan 2.2**